

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN *POLICY BRIEF*

2022

STRATEGI
PENINGKATAN
INDEKS INOVASI
DAERAH (IID)
PROVINSI GORONTALO
MELALUI PENERAPAN
MODEL PENJARINGAN
INOVASI DAN
PENGUKURAN INDEKS
BERBASIS IT

Tim Perumus :

Wawan K. Tolinggi, S.P., M.Si

Nancy Noviana Lantapong, S.Pt., M.Si

Policy Brief



BAPPEDA
PROVINSI
GORONTALO

STRATEGI PENINGKATAN INDEKS INOVASI DAERAH (IID) PROVINSI GORONTALO MELALUI PENERAPAN MODEL PENJARINGAN INOVASI DAN PENGUKURAN INDEKS BERBASIS IT

Tim Perumus :

Wawan K. Tolinggi, S.P., M.Si

Nancy Noviana Lantapong, S.Pt., M.Si

RINGKASAN KEBIJAKAN

Penerapan model penjaringan inovasi daerah dan pengukuran indeks berbasis IT dapat menjadi salah upaya untuk meningkatkan partisipasi Satuan Pemerintah Daerah (SPD) di tingkat provinsi dan Satuan Inovasi Daerah (SID) di tingkat kabupaten/kota dalam melaporkan data dan dokumen inovasi dengan lebih mudah dan cepat, mempermudah pelaksanaan *Innovation Government Award (IGA)* Provinsi Gorontalo khususnya pada proses

LATAR BELAKANG

Kebijakan yang disusun oleh pemerintah sudah semestinya berbasis pada data, yang dengan memanfaatkan data yang akurat, kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi langkah ampuh dalam mengatasi persoalan, dan salah satunya dapat dilakukan dengan membangun sebuah indeks sebagai alat ukur untuk menilai suatu kondisi. Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dibangun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) merupakan upaya untuk meningkatkan inovasi dalam negeri melalui pemerintah daerah. Melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), BPP Kemendagri mampu memetakan kondisi daerah, melakukan pembinaan terhadap daerah sesuai dengan kondisi kekurangannya masing-masing, serta mendorong pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan memanfaatkan data indeks yang jelas yang dapat diakses oleh semua pemerintah daerah [1]. Pengisian data IID melalui laman <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id> menjadi dasar dari penilaian daerah berinovasi yang akan diberikan penghargaan dan/atau insentif pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) yang digelar setiap tahun, sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah [2].

Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) pada tahun 2020, menyatakan bahwa Provinsi Gorontalo berada di peringkat 30 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan kategori “Kurang Inovatif”, dan terdapat satu kabupaten yang dinyatakan *Disclaimer* atau tidak dapat dinilai, yaitu Kabupaten Boalemo [3]. Hasil penilaian IID ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 yang mendapatkan peringkat 23 dan peringkat 27 pada tahun 2019, serta masih dengan kategori “Kurang Inovatif”. Pada tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Gorontalo berhasil naik ke peringkat 14 dari 34 provinsi di Indonesia dengan kategori “Inovatif”, namun masih terdapat juga Satuan Inovasi Daerah (SID) yang turun peringkat (Kota Gorontalo) bahkan *Disclaimer* yaitu Kabupaten Gorontalo Utara [4].



Gambar 1. Rangkaing Provinsi Gorontalo dalam Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kenaikan peringkat Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2021 menjadi 14 dari sebelumnya peringkat 30, belum sepenuhnya dinilai maksimal jika ditinjau hasil rekapitulasi pelaporan inovasi yang menunjukkan bahwa dari sejumlah inovasi daerah yang dilaporkan, persentase inovasi yang diterima hanya sebesar 60%, sedangkan yang ditolak 20%, dan inovasi tidak dikirim 20%.

PERMASALAHAN

Rendahnya skor indeks yang menyebabkan turunnya peringkat Indeks Inovasi Daerah (IID) dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah :

1. Kurang maksimalnya partisipasi Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) dalam menciptakan inovasi dan melakukan pelaporan inovasi setiap tahun.
2. Pelaporan inovasi daerah banyak yang tidak memenuhi persyaratan (tidak *evidence based*), serta tidak ditunjang data-data pendukung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.
3. Rendahnya kualitas inovasi yang dihasilkan, sehingga tidak bisa menunjang hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) secara maksimal.
4. Belum maksimalnya proses pemantauan dan bimbingan teknis (bimtek) dalam upaya meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID).
5. Pentingnya sebuah *database*, sebagai media penyimpanan data inovasi daerah yang lengkap dan teroganisir.

TEMUAN POKOK

Model Penjaringan Inovasi Daerah Berbasis IT

Penjaringan inovasi daerah yang selama ini dilaksanakan dengan mekanisme manual, dinilai belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi Satuan Pemerintah Daerah (SPD) tingkat provinsi dan Satuan Inovasi Daerah (SID) tingkat kabupaten/kota untuk melaporkan data inovasi daerah. Penyampaian informasi tentang pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA) dilakukan melalui surat pemberitahuan yang dikirim bersama dokumen panduan pelaksanaan dan dilanjutkan dengan digelarnya rapat koordinasi untuk penyamaan persepsi. Demikian juga halnya dengan pemasukan data dan dokumen pelaporan inovasi daerah, diserahkan dalam bentuk dokumen cetak, yang jika terdapat kekeliruan atas data dan dokumennya, memerlukan waktu untuk revisi dan pemasukan kembali dokumennya.

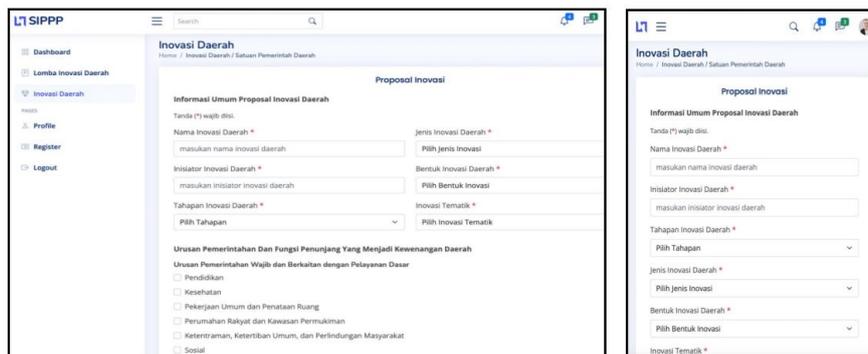
Melalui model penjaringan inovasi daerah berbasis Teknologi Informasi (IT), maka penjaringan inovasi daerah dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan jangkauan yang lebih luas. Dengan demikian, tingkat partisipasi SPD maupun SID dalam menciptakan inovasi serta melaporkan data dan dokumen inovasi daerahnya dapat ditingkatkan. Kurang maksimalnya partisipasi Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) dalam menciptakan inovasi dan melakukan pelaporan inovasi setiap tahun, akan menghasilkan kategori dengan predikat *Disclaimer* atau tidak dapat dinilai.

Kemudahan satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah dalam memasukkan dokumen persyaratan dan data-data pendukung inovasi melalui sistem berbasis IT juga merupakan salah satu manfaat yang diperoleh sebagai upaya untuk meningkatkan skoring Indeks Inovasi Daerah (IID). Pelaporan inovasi daerah yang tidak memenuhi persyaratan (tidak *evidence based*), serta tidak ditunjang data-data pendukung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, akan berpotensi mendapatkan penolakan dalam sistem penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kemendagri.



Gambar 2. Tampilan Halaman Utama Sistem Informasi Penilaian IID berbasis IT

Adapun rendahnya kualitas inovasi yang dihasilkan oleh SPD maupun SID, merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil penilaian skor Indeks Inovasi Daerah (IID), dan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya adalah melalui proses pemantauan skoring IID masing-masing satuan oleh tim yang dibentuk oleh BAPPEDA Provinsi Gorontalo ataupun BAPPEDA kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dapat menggunakan atau memanfaatkan sebuah sistem berbasis IT. Hasil pemantauan skoring Indeks Inovasi Daerah (IID), kemudian digunakan sebagai bahan dalam proses bimbingan teknis (bimtek) berupa pendampingan secara intensif kepada Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID), serta berfokus pada indikator-indikator yang mendapatkan hasil penilaian parameter relatif rendah.



Gambar 3. Tampilan Halaman Penginputan Data Proposal Inovasi Daerah pada Sistem Informasi Penilaian IID berbasis IT

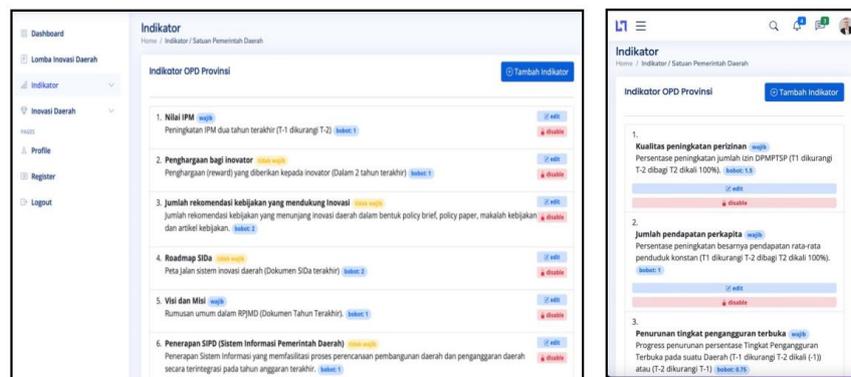
Data dan dokumen pelaporan inovasi daerah hasil penjangkaran berbasis IT selanjutnya dikumpulkan dalam satu *database* sebagai media penyimpanan data inovasi daerah yang lengkap dan terorganisir. Selama ini, dokumen pelaporan inovasi daerah dari setiap Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) hanya tersimpan dalam bentuk *hard copy* di lemari penyimpanan yang mudah hilang atau tercecer, sedangkan dokumen inovasi daerah dalam bentuk *soft file* yang hanya diunggah pada laman <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id> milik Litbang Kemendagri, yang terbatas kewenangan aksesnya. Dengan tersedianya *database*, manajemen data dan dokumen pelaporan inovasi daerah dapat dikelola dengan baik dan terorganisir, serta dapat digunakan untuk kepentingan lainnya seperti bahan pelaporan eksekutif, juga sebagai bahan referensi bagi Satuan Pemerintah Daerah

(SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) dalam menemukan ide dalam upaya penciptaan inovasi daerah yang unik, kreatif, dan bermanfaat.

Pengukuran Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Berbasis IT

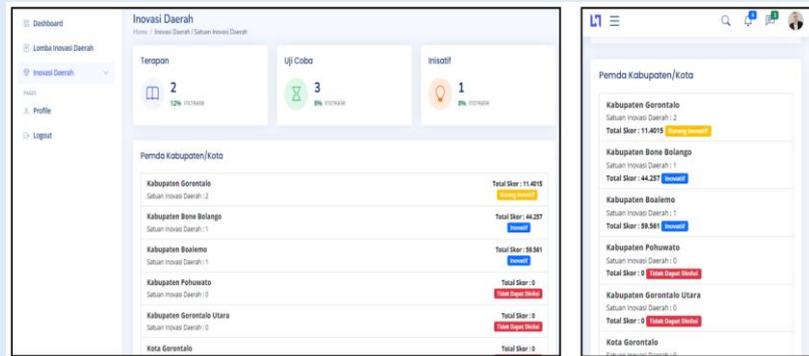
Pengukuran skor Indeks Inovasi Daerah (IID) dilakukan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Litbang Kemendagri setiap tahunnya. Setiap indikator memiliki bobot dan parameter, yang akan membedakan tingkat kepentingan dari setiap indikator IID yang dinilai. Indikator inovasi yang diterapkan pada Satuan Pemerintah Daerah (SPD) berbeda dengan indikator yang diterapkan pada Satuan Inovasi Daerah (SID). Berdasarkan Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2022, terdapat 12 (dua belas) data proposal inovasi daerah, 8 (delapan) variabel, dan total 36 (tiga puluh enam) indikator, yang harus diinputkan oleh setiap Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID). Setiap indikator memiliki bobot dan parameter penilaian. Beberapa indikator yang memiliki bobot tinggi untuk Satuan Pemerintah Daerah (SPD) antara lain adalah “Penetapan APBD tepat waktu”, “Kualitas Peningkatan Perizinan”, “Jumlah Peningkatan Investasi”, “Jumlah Peningkatan PAD”, “Opini BPK”, “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang mendukung Inovasi”, dan “Roadmap SIDA”. Adapun indikator yang memiliki bobot tinggi untuk Satuan Inovasi Daerah (SID) antara lain adalah “Regulasi Inovasi Daerah”, “Replikasi”, “Kemanfaatan Inovasi”, dan “Kualitas Inovasi Daerah”. Selanjutnya melalui proses perhitungan menggunakan formula yang telah ditentukan, menghasilkan sebuah penilaian dalam bentuk kategori predikat “Sangat Inovatif”, “Inovatif”, “Kurang Inovatif”, dan “Tidak Dapat Dinilai” atau *Disclaimer*.

Melalui sistem pengukuran Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) berbasis IT, proses pengukuran dan penilaian skor atas data dan dokumen pelaporan inovasi yang dimasukkan oleh setiap Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat, dibandingkan dengan proses pengukuran skor secara manual. Hasil pengukuran skor Indeks Inovasi Daerah (IID) juga dapat langsung dipantau, untuk kemudian menjadi bahan perbaikan dan bimbingan teknis bagi Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) yang mendapatkan hasil penilaian dengan skoring relatif rendah.



Gambar 4. Tampilan Halaman Penginputan Data Indikator dan Bobot Penilaian pada Sistem Informasi Penilaian IID berbasis IT

Sistem pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Gorontalo dibuat dalam bentuk *web* agar mudah diakses dimana saja dan kapan saja selama berada dalam jaringan internet, serta dapat diakses melalui perangkat *mobile*, untuk membantu tim penilai dalam melakukan proses pengukuran dan penilaian skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID), terutama pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk membawa dan menggunakan perangkat laptop.



Gambar 5. Tampilan Hasil Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) pada Sistem Informasi Penilaian IID berbasis IT

Sistem penjangkaran inovasi dan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) berbasis IT dapat digunakan secara lebih luas, tidak hanya untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan *Innovative Government Award* (IGA) Provinsi Gorontalo, namun dapat dijadikan sebagai sebuah pangkalan data digital semua dokumen pelaporan inovasi daerah, sehingga Satuan Pemerintah Daerah (SPD) di tingkat Provinsi dan Satuan Inovasi Daerah (SID) di tingkat kabupaten/kota dapat menginputkan data inovasinya secara bertahap, tanpa menunggu waktu pemasukan data *Innovative Government Award* (IGA) Nasional yang informasinya biasanya diterima saat mendekati waktu pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya perbaikan, atas hasil pemantauan dan bimbingan teknis dari tim yang dibentuk oleh pengelola Inovasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan pokok yang dipaparkan, maka beberapa strategi peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Gorontalo yang dapat dilakukan adalah :

1. Diimplementasikannya sistem penjangkaran inovasi daerah dan pengukuran indeks berbasis IT, untuk memudahkan akses Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) dalam mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan *Innovative Governemt Award* (IGA) Provinsi Gorontalo, memudahkan dalam memasukan data dan dokumen pelaporan inovasi, mempercepat proses pemasukan kembali data dan dokumen yang belum lengkap atau keliru, lebih memperluas jangkauan ke semua Satuan Pemerinta Daerah (SPD) di tingkat Provinsi dan Satuan Inovasi Daerah (SID) di tingkat kabupaten/kota yang letaknya cukup berjauhan secara geografis, serta mempermudah tim penilai

kegiatan *Innovative Government Award* (IGA) Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengukuran skor Indeks Inovasi Daerah (IID) yang juga memberikan akses yang luas bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat ikut memantau proses pelaporan data inovasi daerahnya masing-masing.

2. Dioptimalkannya proses pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam bentuk pendampingan intensif kepada Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) yang berdasarkan hasil pemantauan skor IID sementara, mendapatkan penilaian yang relatif rendah, dan difokuskan kepada indikator-indikator dengan parameter penilaian yang minimal.
3. Direkomendasikan untuk dilakukannya pemberian insentif bagi para *inventor* untuk meningkatkan motivasi dalam menciptakan ide inovasi yang unik, berkualitas, dan bermanfaat, serta bagi para *inovator* (SPD dan SID) meningkatkan partisipasi dalam melakukan pelaporan data dan dokumen inovasi daerah, mengikuti ajang *Innovative Government Award* (IGA) Provinsi Gorontalo dan IGA Nasional yang dilaksanakan oleh Kemendagri.
4. Diperluasnya cakupan *inventor* yang tidak hanya bersumber dari Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) tetapi juga dapat berasal dari masyarakat, industri, perguruan tinggi, dan unsuer media, dengan model kolaborasi *pentahelix*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. 2020. Membangun Sistem Pendataan Skala Besar. Media BPP Volume 5 Nomor 4 : Juli-Agustus. P-ISSN 2503-3352 E-ISSN 2528-4181.
- [2] Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. 2020. Berlaga di Arena Innovative Government Award (IGA). Media BPP Volume 5 Nomor 6 : November-Desember. P-ISSN 2503-3352 E-ISSN 2528-4181.
- [3] Keputusan Mendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020.
- [4] Keputusan Mendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.